

Identifikasi Kapabilitas Masyarakat Sebagai Dasar Pembangunan Desa Secara Endogen di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Marlina Wirmas¹, Retno Widodo Dwi Pramono²

¹Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: marlina.wirmas@mail.ugm.ac.id

²Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email: pramono.wid@ugm.ac.id

Artikel Diterima: (05 Juli 2021)

Artikel Direvisi: (18 Juli 2021)

Artikel Disetujui: (28 Oktober 2021)

ABSTRACT

Exogenous rural development policy that tends to be centralized and sector-based has caused high dependency of villages to the central government program. Law on Villages then enacted to overcome those issues by shifting the paradigm into endogenous rural development through authorizing villages to self-manage the development. Capability approach is used to identify the actual state of community's well-being, which reflects the freedom of doing and being of the people, so that it can be utilized as the basis for mapping the strength and issues. Assessment is conducted by measuring the level of availability and functioning of five categories of assets that represent modals and opportunities needed by the community to achieve their desired purpose. Research is conducted in Ampek Angkek District by distributing questionnaires to rate the indicators which consist of 51 assets from the five categories. The analysis finds that on average, asset availability index is 0,61 (adequate towards good quality); asset functioning is 1,23 (helpful) and overall community capability index is 0,144 represent fairly good condition, which available assets providing benefits and functions to community to perform its activities. Furthermore, the mapping of the assets of each village shows that there are several assets that need to be improved as input for the rural development agenda. Recommendations above those results are the need to increase the social capital's community, and support assistance from related stakeholder to achieve more self-managing and participatory rural development as basis for endogenous rural development.

Keywords: Capability Approach; Endogenous Rural Approach; Assets

ABSTRAK

Kebijakan pembangunan desa secara eksogen yang bersifat sentralistik dan sektoral selama ini menyebabkan ketergantungan desa yang tinggi terhadap kebijakan pusat. UU Desa lahir untuk mengatasi isu tersebut dengan merubah paradigma ke arah pembangunan secara endogen melalui pemberian wewenang untuk menyelenggarakan pembangunan desa secara mandiri. Pendekatan kapabilitas digunakan untuk mengidentifikasi keadaan kesejahteraan aktual melalui tingkat kebebasan masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan potensi dan isu desa. Penilaian dilakukan dengan mengukur level keterjangkauan dan kebermanfaatan 5 (lima) kelompok aset yang merepresentasikan modal serta kesempatan yang dibutuhkan masyarakat lokal untuk dapat meraih tujuan yang diinginkan. Lokasi penelitian di Kecamatan Ampek Angkek dengan mendistribusikan kuesioner penilaian terhadap 51 aset yang menjadi indikator. Hasil analisis menunjukkan secara rata-rata, tingkat keterjangkauan aset berada pada angka 0,61 (kualitas cukup menuju baik); tingkat kebermanfaatan aset pada angka 1,23 (membantu) dan tingkat kapabilitas masyarakat secara keseluruhan adalah 0,114 yang merepresentasikan kondisi cukup baik. Dengan kondisi ini berarti aset yang tersedia mampu memberikan manfaat dan kebermanfaatan yang baik. Namun, pemetaan lebih lanjut terhadap komponen aset masing-masing nagari menunjukkan masih terdapat beberapa aset yang perlu ditingkatkan sebagai masukan atas agenda pembangunan desa. Rekomendasi atas hasil tersebut adalah kebutuhan untuk meningkatkan modal sosial masyarakat serta kerja sama dengan pihak luar untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan lebih partisipatif.

Kata Kunci: Pendekatan Kapabilitas; Pembangunan Desa Secara Endogen; Aset

Penulis Koresponden:

Nama : Marlina Wirmas

Email : marlina.wirmas@mail.ugm.ac.id

Pendahuluan

Pendekatan pembangunan perdesaan selama ini lebih berorientasi sebagai penyedia sumber daya bagi kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan. Fungsi utama desa adalah sebagai penghasil produk primer seperti produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang menjadi input bagi kegiatan ekonomi sekunder dan tersier di sekitar kota. Struktur yang terbentuk dari proses tersebut melahirkan paradigma model pembangunan desa secara eksogen, yang memiliki karakteristik adanya kutub pertumbuhan sebagai sumber utama di luar perdesaan sebagai kekuatan utama pembangunan (Lowe et al., 1998). Paradigma ini menimbulkan tingkat ketergantungan desa yang tinggi serta dan fokus kebijakan yang kurang berpihak kepada kemandirian desa.

Di Indonesia, model pembangunan desa secara eksogen tersebut mulai diterapkan pada tahun 1970-an, dimana kebijakan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian untuk menyuplai pasokan pangan bagi kawasan perkotaan yang sedang berkembang karena industrialisasi. Kebijakan tersebut pada tahun 1980-an mulai mengalami kemunduran, yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan produktivitas akibat tidak adanya keterkaitan dengan sektor lain serta tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif (Jamal, 2009). Pada tahun 2000-an, beberapa program pembangunan desa juga masih dilaksanakan secara sentralistik, seragam dan sektoral. Beberapa program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) desa yang telah dijalankan di Indonesia seperti PARUL (*Poverty Allocation Rural Urban Linkage*) dan KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal) menghadapi banyak permasalahan dalam implementasinya karena koordinasi yang kurang antar sektor (Rustidja, 2007). Isu-isu yang muncul seperti kendala politik, strategi, sumber daya manusia, pendanaan dan operasional proyek; serta kerangka perumusan program yang menggunakan pendekatan pasar menjadi pemicu lemahnya aspek keberlanjutan berbagai program pembangunan desa tersebut (Rustidja, 2007). Dengan demikian, pendekatan pembangunan perdesaan tersebut mendapat beberapa kritik diantaranya yaitu ketergantungan terhadap subsidi dan kebijakan terpusat, pengabaian aspek non-ekonomi desa, destruksi terhadap keunikan aspek budaya dan lingkungan desa serta adanya pendiktean pembangunan oleh pihak luar desa (Lowe et al., 1998).

Paradigma pembangunan perdesaan dalam perkembangannya mulai mengalami pergeseran ke arah *endogenous approach*, atau mengandalkan faktor lokal dalam menciptakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan perdesaan kemudian lebih diarahkan pada skala teritorial yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor serta menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan desa (Gkartzios & Lowe, 2019). Di Indonesia, peralihan pendekatan tersebut juga mulai diterapkan sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Paradigma pembangunan desa bertujuan untuk kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Adanya UU ini memberikan kedudukan yang jelas bagi desa untuk dapat menjalankan program-program pembangunannya secara mandiri. Kewenangan tersebut juga dapat terealisasi dengan adanya dana desa yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan arah kegiatan yang ingin dicapai.

Namun, berkaca pada implementasi program pembangunan desa sebelumnya, tolak ukur dalam mengevaluasi kesejahteraan penduduk lokal sebagai hasil dari kebijakan pembangunan tidak dapat hanya diukur melalui ketercapaian dari sisi ekonomi makro seperti pendapatan, hasil produksi dan peningkatan lapangan pekerjaan. Penggunaan pendekatan tersebut sebagai

indikator evaluasi pembangunan tidak dapat menggambarkan berbagai aspek kesejahteraan yang jauh lebih luas dari sekedar aspek ekonomi. Paradigma *people centered development* menjadi alternatif yang lebih tepat, karena menempatkan manusia sebagai unsur utama dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Penilaian kinerja pembangunan didasarkan atas kontribusi langsungnya kepada peningkatan kesejahteraan manusia pada aspek sosial dan psikologis, dan juga pada dimensi fisik dan ekonomi (Korten, 1984). Sasaran pembangunan berdasarkan paradigma ini menurut Amartya Sen (2000) adalah kebebasan seseorang (tingkat kapabilitas) dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai dan tujuan yang dianut. Kebijakan pembangunan yang diterapkan harus dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan dan menjadi (*doing and being*) sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan demikian, pendekatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga hasil identifikasi yang dihasilkan dapat melahirkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi aktual, lebih komprehensif, dan bisa jadi merombak kebijakan yang telah biasa digulirkan (Robeyns, 2017).

Dalam konteks pembangunan desa secara endogen, penggunaan pendekatan kapabilitas adalah untuk mengidentifikasi bagaimana keadaan masyarakat lokal dari aspek kesejahteraan dan kebiasaannya. Terdapat 2 (dua) konsep kunci dalam pendekatan kapabilitas. Pertama, *functionings* yaitu berbagai hal yang seseorang lakukan atau menjadi (*doing or being*) (Sen, 2000), yang secara teknis hanya dapat terwujud jika seseorang memiliki 2 (dua) kemampuan, yaitu kepemilikan komoditas/ modal/ sumber daya/ input; serta situasi yang mendukung untuk bisa mengakses kepemilikan tersebut (R. Pramono, 2020). Konsep kedua yaitu kapabilitas yang merujuk kepada tingkat kebebasan untuk mencapai kombinasi alternatif *functioning* (Sen, 2000), atau dapat diartikan pula sebagai besaran peluang untuk memilih kebermanfaatannya (R. Pramono et al., 2019). Kedua aspek ini memiliki kelebihan dalam mengeksplorasi aspek-aspek individual, menjelaskan kenapa seseorang memiliki keterbatasan untuk mencapai/ menjadi sesuatu, serta dapat menjelaskan isu-isu seperti ketimpangan dan kemiskinan secara lebih spesifik dan tepat. Hasil identifikasi ini akan sangat berguna bagi desa untuk dapat menyusun rencana pembangunan desa, karena dapat diketahui pada aspek mana saja potensi desa dapat dikembangkan, sekaligus aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas sebagai gambaran akan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kapabilitas diukur berdasarkan tingkat keleluasaan masyarakat dalam melakukan ataupun menjadi (*to do and to be*) sebagai refleksi terhadap seberapa bebasnya penduduk dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan persepsi yang dianut. Identifikasi mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat desa tersebut dibutuhkan sebagai informasi krusial untuk menentukan arah program pembangunan yang akan diimplementasikan untuk dapat sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Metodologi

1. Kerangka Berpikir

Instrumen identifikasi kesejahteraan masyarakat yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada indeks kapabilitas masyarakat (*Community Capability Index/ Cci*) yang disusun oleh Pramono (2020). Penilaian aset menjadi hal utama dalam pengukuran indeks ini, dimana masing-masing aset merepresentasikan modal sekaligus peluang yang bermanfaat bagi

masyarakat untuk dapat melakukan berbagai macam fungsi. Pramono menggunakan istilah aset karena dapat merepresentasikan *item* atau sumber daya fisik maupun non-fisik yang pemakaiannya tidak terbatas hanya untuk kegiatan ekonomi. Terdapat 2 (dua) aspek yang dinilai, yaitu kualitas ketersediaan aset, dan juga kebermanfaatan aset dalam mencapai fungsi yang dituju. Jenis aset yang dipergunakan untuk menganalisis kapabilitas dapat bersifat kontekstual, yang berarti dapat menyesuaikan dengan kondisi, keadaan ataupun periode (R. Pramono, 2020). Pada penelitian ini, sintesa sub komponen aset dilakukan melalui tinjauan literatur tentang indeks kapabilitas masyarakat (R. W. D. Pramono, 2016), serta beberapa konsep mengenai pembangunan wilayah perdesaan secara endogen. Terdapat 5 (lima) kelompok jenis aset yang digunakan, dimana diturunkan atas hasil identifikasi oleh masyarakat terhadap aset-aset yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Pengelompokkan didasarkan atas karakteristik aset serta hasil observasi lapangan (R. W. D. Pramono, 2016). Adapun kelompok aset beserta masing-masing komponennya sebagai variabel penelitian ini untuk mengukur tingkat kapabilitas disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komponen Aset dalam Mengukur Kapabilitas Masyarakat

No. Aset	Komponen Aset	Kategori
1	Tingkat pendidikan formal petani	Aset Tanwujud Individu/ <i>Individual Intangible Asset</i> (IIA)
2	Kualitas kesehatan & kekuatan petani	
3	Kemampuan berbicara bahasa asing	
4	Kemampuan teknis pertanian (hulu, produksi, hilir)	
5	Kemampuan manajemen/ tata kelola	
6	Kemampuan kewirausahaan/ bisnis	
7	Kemampuan inovasi	
8	Jangkauan akses terhadap teknik terbaru	
9	Kemampuan interpretasi informasi baru	
10	Kemauan untuk belajar dan maju	
11	Daya juang/ ketangguhan untuk belajar dan maju	
12	Lahan/ ruang untuk bermukim	Aset Berwujud Individu/ <i>Individual Tangible Asset</i> (ITA)
13	Lahan/ ruang untuk berusaha/ bertani	
14	Memiliki alat transportasi	
15	Memiliki alat komunikasi	
16	Memiliki perangkat untuk mengakses informasi	
17	Kecukupan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari	
18	Memiliki tabungan	
19	Kualitas lingkungan (kebersihan, air, udara, taman publik)	Aset Berwujud Publik/ <i>Public Tangible Asset</i> (PTA)
20	Produktivitas/ kualitas lahan	
21	Keamanan dari bencana	
22	Kesiapan pemerintah/ masyarakat terhadap manajemen bencana	
23	Kualitas sarana pendukung produksi pertanian	
24	Kualitas sarana pendukung industri lokal	
25	Ketersediaan jaringan jalan (jalan/ kendaraan umum)	
26	Ketersediaan fasilitas transportasi umum	
27	Kualitas transportasi publik	
28	Ketersediaan fasilitas pendidikan	
29	Ketersediaan fasilitas kesehatan	
30	Ketersediaan fasilitas pasar/ perdagangan	
31	Kemudahan akses air bersih	
32	Ketersediaan internet untuk masyarakat	
33	Keikutsertaan dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Aset Institusional Sosial/ <i>Social Institutional Asset</i> (SIA)
34	Keikutsertaan dalam organisasi sektoral pertanian	
35	Keterlibatan dalam forum diskusi usaha pertanian	
36	Pertukaran informasi terbaru mengenai sektor pertanian	
37	Intensitas gotong royong dan kerja sama	
38	Tingkat solidaritas	

No. Aset	Komponen Aset	Kategori
39	Tingkat kejujuran & kepercayaan dalam masyarakat	
40	Kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman/ kredit	
41	Kemudahan mendapatkan pekerjaan	
42	Kesempatan untuk memulai usaha	
43	Peluang menyalurkan aspirasi/ berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	
44	Kemudahan mendapatkan barang konsumsi sehari-hari	Aset Institusional Ekonomi/ <i>Economy Institutional Asset</i> (EIA)
45	Kemudahan mendapatkan bahan baku produksi pertanian	
46	Kemudahan pemasaran produk pertanian	
47	Peluang dalam mendapatkan bantuan/ subsidi pemerintah dalam kegiatan pembangunan	
48	Kemudahan pendaftaran jaminan kesehatan	
49	Kemampuan untuk membayar biaya pendidikan	
50	Kemampuan untuk membeli/ mendapatkan/ menyewa rumah	
51	Kemampuan pembayaran biaya transportasi	

Sumber : Cohen & Levinthal, 1989; Ghani, 2013; Putterman, 2013; Pramono, 2016

Keseluruhan aset tersebut akan dinilai secara persepsi oleh masyarakat dalam sesuai tingkatan untuk aspek kualitas ketersediaan dan kebermanfaatannya melalui kuesioner kepada penduduk lokal. Hasil penilaian tersebut kemudian dihimpun untuk melihat rerata pada masing-masing kelompok. Adapun untuk menghitung Indeks kapabilitas masyarakat (*Community capability index/ Cci*), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Cci = \frac{1}{8} AF^2$$

Keterangan:

A = rerata skor ketersediaan seluruh aset

F = rerata skor kebermanfaatan seluruh asset

Analisis mengenai interpretasi hasil pengukuran kemudian dijabarkan secara deskriptif berdasarkan informasi tambahan yang dari hasil wawancara, observasi dan juga data sekunder. Identifikasi awal akan menjelaskan kondisi ketersediaan dan kebermanfaatan dari masing-masing kelompok aset, untuk mengetahui bagaimana pemahaman dari masyarakat lokal terhadap beberapa aset yang memiliki performa kurang baik. Pembahasan hasil tersebut juga akan menyangkut konsep pembangunan perdesaan secara endogen. Analisis dilanjutkan dengan menghitung rerata nilai ketersediaan, kebermanfaatan dan indeks Cci pada tingkat nagari dan kecamatan. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat pada komponen aset apa saja yang butuh untuk ditingkatkan oleh nagari sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan ke depan. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat merasakan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan aspek kebebasannya dalam menjalani kehidupan.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wilayah ini dipilih karena menggambarkan karakteristik kawasan perdesaan saat ini yang didominasi oleh sektor pertanian, namun sudah mulai ada transisi menuju sektor sekunder dan tersier. Sebagian kecil kawasan di kecamatan ini sudah mulai meng-kota karena adanya pengaruh dari aktivitas perkotaan di Kota Bukittinggi yang berbatasan langsung di sebelah barat. Wilayah ini merupakan sentra penghasil padi di Kabupaten Agam, karena sebagian

besar guna lahannya adalah berupa persawahan atau perkebunan. Selain itu, Kecamatan Ampek Angkek juga berperan sebagai sentra industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Agam, yang dibuktikan dengan banyaknya usaha sulaman dan bordiran sebagai salah satu produk unggulan, serta usaha-usaha kecil pengolahan makanan. Kegiatan pertanian dan industri di wilayah ini sebagian besar dipasarkan untuk menyuplai kebutuhan pangan penduduk serta modal bagi kegiatan sektor sekunder dan tersier di kawasan perkotaan Bukittinggi dan Agam Timur.

Beberapa kebijakan pembangunan perdesaan oleh pemerintah pusat yang telah dijalankan di Kecamatan Ampek Angkek merupakan program sektoral di bidang pertanian. Diantaranya yaitu penunjukan sebagai kawasan agropolitan pada tahun 2002 oleh Departemen Pertanian, pembangunan Sub Terminal Agribisnis pada tahun 2003 oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pelaksanaan Program Prima Tani di Nagari Panampuang pada tahun 2007 dan penerapan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) di Nagari Panampuang pada tahun 2013. Balai Penyuluh Pertanian di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Agam juga telah didirikan sejak tahun 2009 dan memiliki program utama untuk memberikan bantuan sarana produksi tani, membangun infrastruktur pendukung, serta mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pertanian (BPP Kec. Ampek Angkek 2019). Adapun untuk program lain di luar cakupan sektor pertanian, berdasarkan penelusuran baru diperoleh pada tahun 2019 oleh Nagari Panampuang. Industri sulaman tradisional di nagari tersebut mendapatkan bantuan berupa Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada aspek pemasaran dan peningkatan kapasitas pengusaha. Adapun untuk pemanfaatan dana desa, kegiatan pembangunan mayoritas dilaksanakan pada bidang pembangunan fisik berupa jalan dan infrastruktur permukiman, serta pelatihan-pelatihan keterampilan. Program ini belum bersifat jangka panjang dan komprehensif, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.

3. Metode & Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kuantitatif, dengan arti instrumen penelitian merupakan turunan dari tinjauan literatur mengenai pendekatan kapabilitas. Kuesioner sebagai instrumen utama untuk penelitian ini memuat lima puluh satu jenis aset sebagai variabel, yang dibagi ke dalam lima kategori aset. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner, wawancara dan observasi. Kuesioner memuat pertanyaan mengenai persepsi responden terhadap penilaian kualitas ketersediaan serta kebermanfaatan aset dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian menggunakan *scoring* atau rentang nilai antara -2 hingga 2 untuk memudahkan interpretasi oleh responden.

Tabel 2. Rentang Penilaian Aset

Rentang Nilai	Kualitas Ketersediaan	Tingkat Kebermanfaatan
-2	Sangat buruk	Sangat menghambat
-1	Buruk	Menghambat
0	Cukup	Tidak jelas
1	Baik	Membantu
2	Sangat baik	Sangat membantu

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Sampel penelitian ditentukan secara *purposive* dengan menentukan responden yang merupakan penduduk lokal, memiliki pekerjaan di dalam wilayah studi, dan bekerja pada sektor pertanian, industri atau perdagangan dan jasa. Penentuan karakteristik ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran kualitatif yang lebih terarah dan spesifik dalam menjelaskan aset-aset yang berpengaruh pada sektor ekonomi tertentu. Adapun jumlah sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin menggunakan jumlah penduduk Kecamatan Ampek Angkek sebanyak 50.522 orang. Jumlah responden tiap nagari kemudian dihitung secara proporsi terhadap persentase penduduk kecamatan, sehingga didapatkan total responden sebanyak 101 orang untuk ketujuh nagari. Rentang waktu pengambilan data pada Bulan Februari hingga April 2021. Selain kuesioner, informasi juga didapatkan melalui obeservasi serta wawancara dengan beberapa orang penduduk lokal dari sektor pertanian dan IKM, serta perwakilan dari Wali Nagari dan Balai Penyuluh Pertanian.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Sosial dan Ekonomi Responden

Karakteristik didapatkan dari hasil kuesioner yang disebar kepada responden. Pada Tabel 3 berikut adalah gambaran kondisi sosial dan ekonomi responden.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah	Persentase
Nagari	Ampang Gadang	17	16,83%
	Balai Gurah	9	8,91%
	Batu Taba	18	17,82%
	Biaro Gadang	22	21,78%
	Lambah	9	8,91%
	Panampuang	19	18,81%
	Pasia	7	6,93%
Jenis Kelamin	Laki-laki	67	66,33%
	Perempuan	34	33,66%
Usia	15-35 tahun	41	40,59%
	36 s.d. 64 tahun	55	54,46%
	65 tahun ke atas	5	4,95%
Pendidikan Terakhir	SD	7	6,93%
	SMP	19	18,81%
	SMA	47	46,53%
	Perguruan Tinggi	28	27,72%
Sektor Pekerjaan	Pertanian	44	43,56%
	Perdagangan & IKM	31	30,69%
	Jasa	26	25,74%
Status Pekerjaan	Pemilik/ pengusaha	38	37,62%
	Pekerja/ karyawan tetap	7	6,93%
	Pekerja/ karyawan tidak tetap	21	20,79%
	Buruh lepas/ harian	35	34,65%
Rerata Penghasilan	< 1 juta/ bulan	43	42,57%
	1 s.d. 2,4 juta/ bulan	50	49,5%
	2,4 s.d. 5 juta/ bulan	8	7,92%

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Dari aspek sosial, dari kelompok usia diketahui bahwa mayoritas jumlah responden tergolong kepada usia produktif yaitu pada rentang 15 - 64 tahun. Pada kategori pendidikan terakhir, hasil menunjukkan kualitas yang lumayan baik dengan sebanyak 74% responden telah menempuh pendidikan setingkat SMA dan perguruan tinggi.

Dari aspek perekonomian, karakteristik digambarkan dari sektor pekerjaan, status pekerjaan dan rerata penghasilan. Hal yang perlu diperhatikan dari aspek ini adalah pada informasi mengenai rerata penghasilan, dimana mayoritas responden (sebanyak 92%) memiliki pendapatan di bawah UMR Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 2.484.041. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sebagian kebutuhan hidup yang masih kurang atau memiliki kualitas yang belum maksimal. Kondisi ini juga didukung oleh informasi mengenai sektor dan status pekerjaan responden, yang mana persentase paling tinggi ditunjukkan oleh pekerjaan sektor primer dan status pekerja yang masih belum tetap.

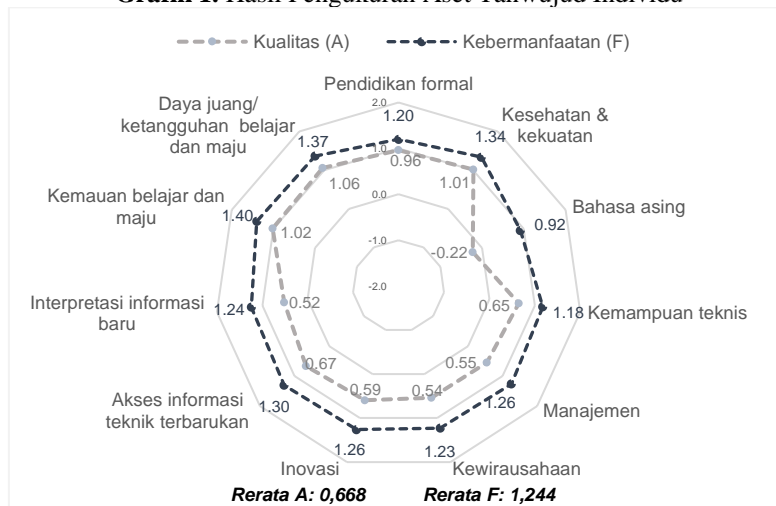
2. Identifikasi Kualitas dan Kebermanfaatan Aset

Identifikasi tingkat kualitas ketersediaan dan kebermanfaatan aset bertujuan untuk mengetahui beberapa komponen mana yang memiliki penilaian performa yang masih kurang atau sudah baik, dan disertai dengan penjelasan pendukung atas hasil penilaian tersebut. Penjelasan akan dikelompokkan berdasarkan lima kategori aset berikut.

2.1. Aset Tanwujud Individu

Aset tanwujud individu merepresentasikan kemampuan atau keahlian yang melekat dan dimiliki oleh individu, yang secara umum berpengaruh terhadap kinerja individu di dalam pekerjaan yang dimilikinya. Berdasarkan teori endogen dalam pembangunan wilayah, aset ini merupakan modal utama bagi masyarakat lokal dalam memajukan daerahnya. Pada aspek ketersediaan aset, penilaian didapatkan dari persepsi individu mengenai kualitas kemampuan yang dimiliki, sedangkan pada aspek kebermanfaatan, penilaian dikhususkan kepada tingkat manfaat yang diberikan pada kegiatan sehari-hari.

Grafik 1. Hasil Pengukuran Aset Tanwujud Individu



Sumber: Analisis Penulis, 2021

Pada aspek kualitas kemampuan, terdapat tiga komponen IIA yang memiliki nilai tertinggi dan mendekati 1 (dengan penilaian “baik”), yaitu kesehatan dan kekuatan, kemauan untuk belajar dan maju, serta daya juang untuk belajar dan maju. Adapun terdapat satu komponen dengan nilai rerata negatif, yaitu kemampuan bahasa asing, dengan rerata nilai -0,22 yang diinterpretasikan menuju buruk. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi eksisting dari modal manusia di Kecamatan Ampek Angkek secara umum memperlihatkan kualitas yang cukup, namun masih butuh untuk mencapai kategori baik untuk dapat mencapai pembangunan desa secara mandiri. Komponen kemampuan teknis, manajemen,

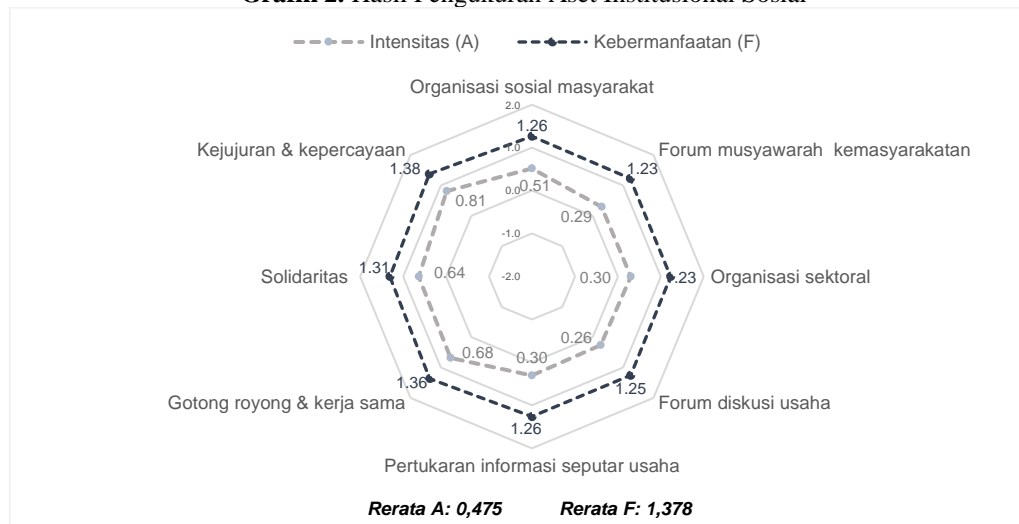
kewirausahaan, inovasi dan akses terhadap informasi baru berdasarkan teori merupakan modal utama yang butuh untuk ditingkatkan lagi oleh individu untuk dapat membangun wilayahnya secara endogen. Adapun hal positif yang dapat dilihat dari kelompok aspek ini adalah kemauan dan sifat tangguh untuk belajar dan maju dari masyarakat lokal yang tergolong baik, sehingga diharapkan dapat memberikan tren yang positif bagi masyarakat lokal untuk dapat terus meningkatkan kemampuannya.

Pada aspek kebermanfaatan, semua komponen kecuali bahasa asing mendapatkan rerata nilai di atas 1, yang berarti memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Komponen yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah kesehatan dan kekuatan, dan serta kemauan dan daya juang untuk belajar dan maju. Hal ini ditunjang dengan informasi mengenai sektor pekerjaan responden, yang mana sebanyak 33,81%-nya berprofesi sebagai petani, serta 39,13%-nya bekerja pada sektor jasa yang membutuhkan modal kekuatan untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan juga teknik terbaru membuat adanya kebutuhan bagi para pekerja untuk terus belajar agar dapat maju dan menjadi lebih kompetitif.

2.2. Aset Institusional Sosial

Aset institusional sosial menggambarkan serangkaian modal yang dapat memberikan individu kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kapabilitas maupun modal lain dalam mewujudkan kebermanfaatan individu. Sumber daya ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring guna mendapatkan informasi serta peluang kerja sama dan berpartisipasi dalam mendapatkan manfaat.

Grafik 2. Hasil Pengukuran Aset Institusional Sosial



Sumber: Analisis Penulis, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan untuk intensitas modal sosial, diketahui bahwa secara umum nilai untuk komponen ini lebih rendah jika dibandingkan dengan aset tanwujud individu sebelumnya. Jika dikelompokkan, intensitas masyarakat terhadap keikutsertaan dalam wadah sosial kemasyarakatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat sektoral-ekonomi. Terdapat 3 (tiga) komponen modal sosial di bidang ekonomi yang nilainya mendekati 0 atau lebih rendah dari 0,5 (direpresentasikan dengan intensitas/ keterlibatan biasa/ cukup/ lumayan), yaitu diskusi usaha, organisasi sektoral, dan pertukaran informasi

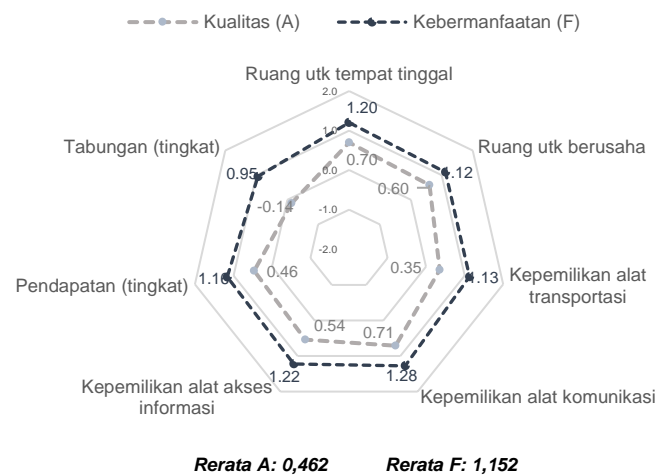
usaha/ pekerjaan. Berkenaan dengan forum-forum diskusi, beberapa responden menyebutkan adanya hambatan keikutsertaan dari segi waktu yang bersamaan dengan waktu kerja. Beberapa responden dari kalangan petani diantaranya menuturkan bahwa jika mereka mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Balai Penyuluh (dengan frekuensi 1-2 kali sebulan), maka waktu mereka bekerja di sawah akan berkurang. Oleh karena itu, intensitas keikutsertaan mereka pada kegiatan-kegiatan kelompok tani bisa fluktuatif tergantung siklus musim tanam.

Selain itu, organisasi-organisasi sektoral ekonomi selain pertanian memang belum terbentuk di Kecamatan Ampek Angkek. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Agam, diketahui bahwa organisasi pada bidang usaha dan perdagangan yang terdaftar di Kab. Agam hanyalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Asosiasi ini diketahui tidak terlalu terjangkau sampai ke semua kecamatan di seluruh kabupaten. Salah satu pengusaha bordir dan sulaman sebagai komoditas unggulan di Ampek Angkek menyebutkan, organisasi yang mewadahi antar sesama pengusaha selama ini belum ada. Para pengusaha cenderung memilih untuk menjalankan usahanya secara mandiri, sehingga tidak banyak diselenggarakan forum-forum diskusi dengan pihak lain. Adapun untuk strategi inovasi dan pengembangan produk, para pengusaha biasanya melakukannya secara mandiri dengan pihak luar, seperti memesan desain dan motif baru kepada mahasiswa Desain Mode di ISI Padang Panjang. Inisiasi pembentukan wadah pengusaha sulaman dan bordiran baru dimulai pada akhir tahun 2020 ini sebagai salah satu strategi untuk memecahkan masalah penurunan omzet akibat pandemi Covid-19.

Pada aspek kebermanfaatannya, hasil analisis menunjukkan angka yang cenderung memusat pada rentang 1,2 hingga 1,3 yang menunjukkan adanya manfaat terhadap modal sosial. Perbandingan antar komponen aset menunjukkan karakteristik modal sosial yang lebih bersifat personal, yaitu kejujuran & kepercayaan, solidaritas dan gotong royong & kerja sama mendapatkan nilai manfaat yang lebih tinggi daripada komponen yang melibatkan keikutsertaan kelompok. Selain itu, perbandingan antara nilai intensitas dan nilai manfaat menunjukkan rentang yang cukup signifikan. Diantara kelima jenis kelompok aset, selisih antara nilai manfaat dengan nilai keterjangkauan untuk aset institusional ini mendapatkan jarak paling besar. Dengan demikian, jika intensitas masyarakat dapat lebih ditingkatkan, khususnya pada bidang sektoral-ekonomi, maka diharapkan manfaat yang dihasilkan akan lebih signifikan untuk pembangunan nagari. Fungsi yang ditimbulkan berdasarkan teori modal sosial sebagai faktor endogen pembangunan mencakup kemudahan dalam memperoleh keuntungan mutual dalam skala kelompok, dan juga sebagai sumber daya bagi individu untuk memperluas kebermanfaatannya.

2.3. Aset Berwujud Individu

Aset berwujud individu menggambarkan aset-aset yang memiliki wujud fisik dan biasanya diasosiasikan sebagai modal untuk kegiatan produksi atau pekerjaan sehari-hari. Kepemilikan aset ini juga banyak dipersepsikan sebagai ukuran tingkat kekayaan seseorang secara konvensional.

Grafik 3. Hasil Pengukuran Aset Berwujud Individu

Sumber: Analisis Penulis, 2021

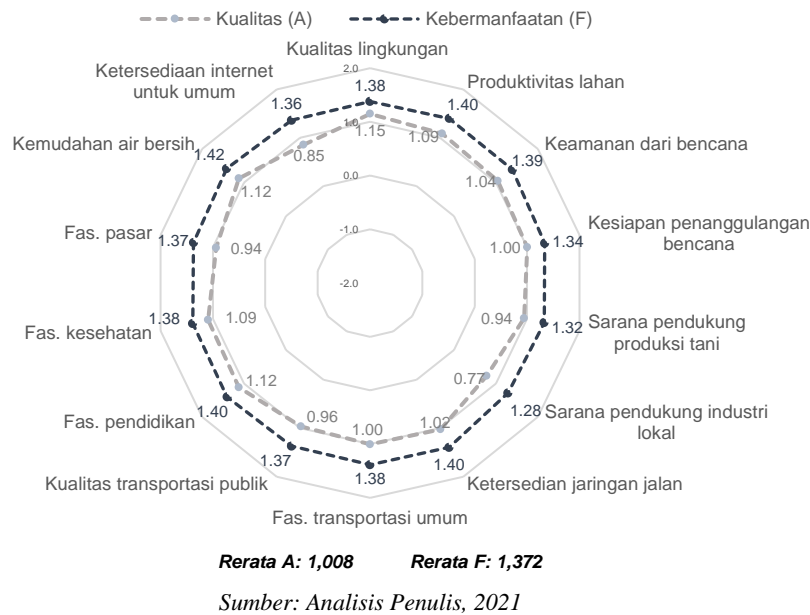
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui secara umum melalui rerata nilai kualitas aset berwujud responden adalah di antara cukup dengan baik. Hal ini menggambarkan bahwa aset berwujud yang dimiliki oleh masyarakat lokal Nagari Ampek Angkek berada pada level cukup/rata-rata. Pada komponen ruang untuk tempat tinggal dan usaha, kepemilikan alat komunikasi dan alat untuk mengakses informasi, dimiliki masyarakat lokal dalam kualitas di atas cukup. Adapun khusus untuk aset tabungan memiliki nilai negatif, yang mengindikasikan kepemilikan yang kurang dari cukup meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan sebanyak 32,25 % responden merupakan pekerja dengan status pekerjaan tidak tetap, sehingga kemampuan untuk dapat menabung tidak begitu baik.

Pada aspek kebermanfaatan, kepemilikan alat komunikasi menjadi komponen dengan nilai paling tinggi. Kebutuhan terhadap alat komunikasi menjadi krusial pada saat ini karena pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Nagari Panampuang menyebutkan bahwa sarana komunikasi berperan sangat penting untuk berhubungan dengan para pemborong dan pembeli yang berada di luar kota dan luar negeri. Adapun komponen yang memiliki nilai kebermanfaatan paling kecil adalah tabungan, dengan nilai 0,95. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman bahwa pendapatan yang disimpan tanpa diberdayakan tidak memberikan manfaat langsung kepada individu. Dalam konteks pembangunan, aset berwujud individu memiliki peran dalam mempermudah masyarakat dalam berkegiatan produktif (seperti kepemilikan alat transportasi, komunikasi) serta sebagai modal untuk berusaha (pendapatan dan ruang/ lahan). Kepemilikan atas aset ini membutuhkan modal dari masing-masing individu, sehingga hanya dapat terpenuhi dengan adanya peningkatan produktivitas masyarakat.

2.4. Aset Berwujud Publik

Aset berwujud publik merepresentasikan berbagai fasilitas, layanan publik dan sumber daya lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kelompok aset ini secara umum mendukung terselenggaranya kegiatan sehari-hari masyarakat lokal, baik dari sisi sektor ekonomi maupun kebutuhan harian.

Grafik 4. Hasil Pengukuran Aset Berwujud Publik



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa secara umum, kualitas berbagai sarana dan prasarana publik di Kecamatan Ampek Angkek berada dalam kondisi baik dengan rerata nilai satu. Lokasi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi, menyebabkan sebagian kawasan khususnya yang berada di sepanjang jalan provinsi telah meng-kota dengan fasilitas yang lebih baik. Beberapa fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi, terpenuhi pada skala layanan regional di Kota Bukittinggi yang umumnya tersedia lebih lengkap dan memiliki kualitas yang lebih baik.

Adapun untuk fasilitas publik dengan nilai paling rendah adalah sarana pendukung industri lokal, dengan angka 0,77. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya ketersediaan sarana publik terkait seperti gudang penyimpanan dan sortasi, pusat pengolahan, dan juga pemasaran. Industri lokal masih didominasi oleh unit usaha skala mikro dan kecil, yang ditandai dengan semua permodalan mandiri oleh pemilik usaha dari keseluruhan sistem dari hulu hingga hilir. Adapun dukungan yang pernah terselenggara hanya sebatas pelatihan jangka pendek, serta bantuan tunai saat pandemi Covid-19. Selain itu, komponen lain dengan rerata kualitas di bawah rata-rata adalah internet, dengan angka 0,85. Hal ini dikarenakan terdapat dua nagari dengan jangkauan internet masih belum merata, yaitu Panampuang dan Balai Gurah. Hanya *provider* tertentu yang dapat menjangkau seluruh nagari, sehingga berpengaruh terhadap persepsi yang diberikan oleh masyarakat lokal. Terdapat dua komponen lain yang mendapatkan nilai di bawah 1, yaitu kualitas transportasi publik dan fasilitas pasar. Untuk transportasi publik, jenis yang melayani ke wilayah Kecamatan Ampek Angkek adalah angkutan umum (angkot) yang hanya melayani Jalan Raya yang melewati dan sebagian jalan lokal. Sebagian nagari yang mayoritas wilayahnya terletak di bagian timur seperti Panampuang dan Lambah tidak terjangkau oleh Angkutan Umum. Oleh karena itu, moda transportasi publik di wilayah ini masih dapat dikatakan masih terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kawasan. Adapun untuk fasilitas pasar, hanya terdapat dua pasar di Kecamatan Ampek Angkek. Salah satunya masih berupa bangunan semi permanen di

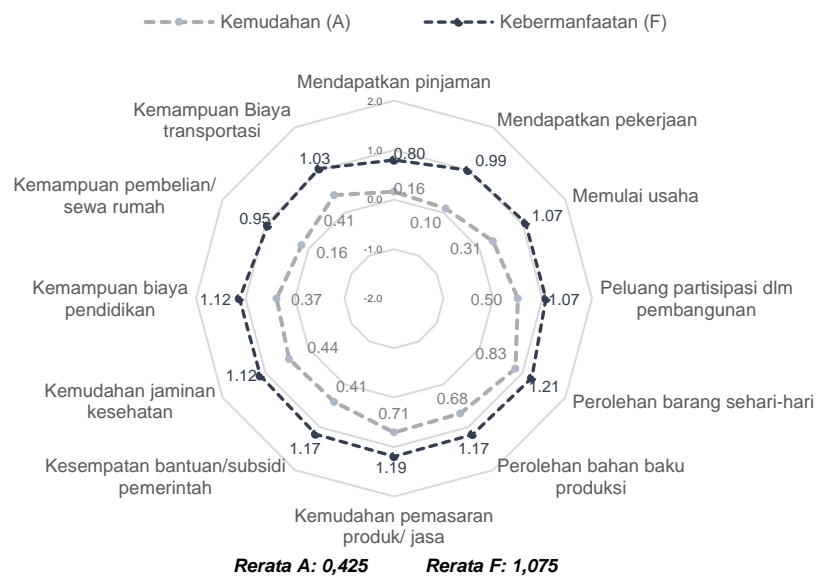
Nagari Biaro Gadang, dan satu lagi adalah Pasar Agro yang sudah tidak berfungsi. Sebagian besar masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari di Kota Bukittinggi, karena dinilai lebih lengkap.

Pada aspek kebermanfaatan, kualitas lahan; jaringan jalan; fasilitas pendidikan dan kemudahan mendapatkan air bersih mendapatkan nilai tertinggi pada rentang 1,4. Sektor pertanian khususnya untuk komoditas padi yang menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama di Kecamatan Ampek Angkek membutuhkan lahan dan air sebagai modal utama dalam kegiatan produksi, sehingga angka untuk aspek ini mendapat nilai yang lumayan tinggi. Selain itu jaringan jalan juga secara umum sangat dibutuhkan untuk berbagai kegiatan sehari-hari, sehingga mendapat nilai yang juga tinggi. Penilaian untuk kelompok aset ini secara umum sudah baik, khususnya untuk aspek yang berkaitan dengan fasilitas sosial. Peningkatan secara khusus dibutuhkan untuk infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi pertanian dan industri, agar lebih memudahkan masyarakat lokal dalam kegiatan produksi.

2.5. Aset Institusional Ekonomi

Aset institusional ekonomi menggambarkan aspek-aspek yang menunjang kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan maupun kesempatan untuk mengembangkan pekerjaan. Komponen ketersediaan menggambarkan kemudahan akses atau kemampuan pembiayaan responden, sedangkan untuk komponen kebermanfaatan menggambarkan persepsi tingkat fungsi yang disediakan oleh masing-masing aset.

Grafik 5. Hasil Pengukuran Aset Institusional Ekonomi



Sumber: Analisis Penulis, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, angka rerata kemudahan akses dalam aset institusional ekonomi berada pada 0,42 atau berkisar antara cukup dan baik. Komponen dengan nilai terendah adalah akses untuk mendapatkan pekerjaan, pinjaman bank/ kredit dan kemampuan untuk pembelian/pembayaran sewa rumah. Dalam hal kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, mayoritas responden dengan jawaban sulit memiliki status pekerjaan tidak tetap dengan rerata pendidikan terakhir di bawah SMA. Dengan latar belakang demikian, diketahui bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas dengan

kestabilan pekerjaan yang kurang. Pada saat survei primer, terjadi pandemi Covid-19 dimana banyak para perantau dari Pulau Jawa yang diberhentikan dari pekerjaan pulang ke kampung halaman. Di Nagari Panampuang, banyak perantau yang beralih profesi menjadi petani/buruh tani. Namun beberapa komoditas non padi mengalami penurunan permintaan, sehingga banyak petani yang mengalami kerugian akibat produk yang tidak terjual. Selain itu, sebanyak 52% mengalami penurunan penghasilan dalam kurun waktu 3-4 tahun ke belakang, sehingga menyebabkan kesulitan untuk memiliki rumah maupun membayar sewa rumah. Dalam hal akses pinjaman bank, status pekerjaan tidak tetap memang menjadi kendala utama penduduk untuk dapat mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan petani dan pengusaha lokal, meminjam uang di bank merupakan hal yang sangat dihindari, karena dua alasan utama, yaitu adanya rasa tidak tenang karena tidak yakin mampu bisa melunasinya akibat penghasilan yang tidak tetap, dan juga karena adanya bunga atau riba. Oleh karena itu sangat sedikit penduduk yang mau mengajukan pinjaman ke bank.

Pada aspek kebermanfaatan, rerata manfaat yang dirasakan oleh responden terhadap komponen aset ini berada pada angka 1,08 atau dikategorikan memberikan manfaat. Akses terhadap berbagai macam kegiatan dan proses ekonomi serta kebutuhan sehari-hari dibutuhkan oleh masyarakat baik dalam bekerja maupun dalam berkegiatan lainnya. Terdapat satu komponen dengan nilai manfaat di bawah 1, yaitu akses terhadap kredit atau pinjaman bank, yang menunjukkan keserasian dengan deskripsi sebelumnya, dinilai oleh masyarakat agak membebankan karena terdapat ketidakpastian terhadap prospek pelunasan hutang. Karakteristik responden yang setengah dari jumlahnya memiliki status pekerjaan tidak tetap membuat kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan.

3. Indeks Kapabilitas Masyarakat Nagari

Pengukuran tingkat kesejahteraan diidentifikasi dengan melihat indeks kapabilitas masyarakat (*Community capability indeks/ Cci*) yang merepresentasikan tingkat kebebasan individu. Kapabilitas dihitung dengan mengukur kualitas ketersediaan (*availability/ A*) dan kebermanfaatan (*functioning/ F*) dari lima kelompok jenis aset. Berikut adalah hasil analisis kapabilitas untuk ketujuh nagari di Kecamatan Ampek Angkek.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Indeks Kapabilitas Masyarakat di Kecamatan Ampek Angkek

NAGARI	Ketersediaan (A)					Rerata A	Kebermanfaatan (F)					Rerata F	Cci
	IIA	SIA	PTA	ITA	EIA		IIA	SIA	PTA	ITA	EIA		
<i>rentang</i>	<i>-2 s.d 2</i>						<i>-2 s.d 2</i>						<i>-1 s.d 1</i>
Ampang Gadang	0,74	0,26	1,06	0,68	0,48	0,65	1,44	1,19	1,50	1,34	1,20	1,34	0,144
Balai Gurah	0,67	0,89	0,93	0,49	0,50	0,70	1,17	1,43	1,48	1,22	1,37	1,33	0,155
Batu Taba	0,81	0,51	1,28	0,63	0,57	0,76	1,31	1,41	1,47	1,10	1,05	1,27	0,153
Biaro Gadang	0,51	0,13	0,86	0,26	0,20	0,39	1,26	1,13	1,35	1,08	0,83	1,13	0,062
Lambah	0,82	0,67	1,39	0,24	0,41	0,70	1,31	1,43	1,51	1,27	1,27	1,36	0,162
Panampuang	0,55	0,51	0,74	0,58	0,38	0,55	1,16	1,36	1,20	1,02	0,88	1,12	0,087
Pasia	0,58	0,36	0,80	0,35	0,44	0,50	1,05	1,05	1,10	1,02	0,93	1,03	0,067

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Hasil analisis menunjukkan indeks kapabilitas untuk nilai Cci, A dan F dari ketujuh nagari berapa pada angka positif. Hal ini merepresentasikan tingkat kebermanfaatan yang cukup, dengan indeks kapabilitas yang mendorong tren positif. Secara umum, kondisi ini dapat

dikatakan relatif baik karena aset memiliki rerata kualitas di atas cukup, dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal dalam berkegiatan sehari-hari.

Jika ditinjau berdasarkan nilai Cci untuk masing-masing nagari, terdapat dua kelompok dengan rentang nilai yang cukup berbeda. Nagari Ampang Gadang, Balai Gurah, Batu Taba dan Lambah berada di golongan lebih tinggi dengan rentang antara 0,14 hingga 0,16. Rerata nilai ketersediaan dan kebermanfaatan aset untuk keempat nagari ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga nagari lainnya. Keempat nagari juga menempati indeks tertinggi untuk kesepuluh aspek yang diukur pada penilaian Cci ini, yaitu Nagari Batu Taba dan Lambah untuk aset tanwujud individu, Nagari Balai Gurah untuk Aset Institusional Sosial, Nagari Lambah untuk Aset Berwujud Publik, Nagari Ampang Gadang untuk Aset Berwujud Individu Nagari Batu Taba untuk Aset Institusional Ekonomi. Dengan hasil demikian, maka masyarakat di keempat nagari ini memiliki tingkat kebebasan lebih tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai kualitas aspek yang telah menuju kondisi baik dan memberikan kebermanfaatan terhadap perwujudan kebermanfaatan penduduk.

Ketiga nagari lainnya, yaitu Nagari Biaro Gadang, Panampuang dan Pasia memiliki indeks kapabilitas masyarakat pada rentang 0,06 hingga 0,08. Meskipun kondisi ini tergolong positif karena aset memiliki kualitas yang cukup dan memberikan manfaat, namun angka yang mendekati nol tersebut patut untuk menjadi perhatian karena di masa depan, bisa jadi dapat menurun karena adanya penurunan fungsi aset. Dengan demikian, beberapa komponen aset yang memiliki nilai tergolong rendah butuh untuk ditingkatkan dan menjadi prioritas agenda pembangunan.

4. Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kapabilitas Nagari

Identifikasi kondisi kesejahteraan nagari menggunakan pendekatan kapabilitas berfungsi untuk dapat menjelaskan aspek-aspek ketercapaian pembangunan secara lebih komprehensif dan aktual sesuai dengan persepsi masyarakat lokal. Luasnya cakupan aspek yang dinilai menjadi informasi yang berharga bagi desa untuk dapat mengetahui potensi yang dimiliki, sekaligus mengidentifikasi, aspek mana saja yang butuh untuk ditingkatkan.

Identifikasi kapabilitas di ketujuh Nagari di Kecamatan Ampek Angkek, selain menghasilkan indeks Cci yang menggambarkan kondisi kesejahteraan, juga menghasilkan pemetaan kebutuhan pembangunan aset. Pemetaan digambarkan dengan mengidentifikasi komponen aset yang butuh untuk ditingkatkan, dengan nilai ketersediaan di bawah 0,5. Prioritas juga dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu prioritas 1 yang berarti sangat urgen (dengan nilai A di bawah nol), prioritas 2 (dengan nilai A antara 0 s.d 0,2) dan prioritas 3 (dengan nilai A antara 0,2 s.d 0,5).

Tabel 4. Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kualitas Aset di Kecamatan Ampek Angkek

Komponen Aset		Ampang Gadang	Balai Gurah	Batu Taba	Biaro Gadang	Lambah	Panampuang	Pasia
IIA	Bahasa asing	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 1	Prioritas 1
	Kemampuan teknis	Prioritas 3					Prioritas 3	
	Manajemen/ tata kelola				Prioritas 3		Prioritas 3	Prioritas 3
	Kewirausahaan/ bisnis	Prioritas 3			Prioritas 3		Prioritas 3	Prioritas 3
	Inovasi				Prioritas 3		Prioritas 3	
	Akses informasi teknik terbaru						Prioritas 3	

Komponen Aset		Ampang Gadang	Balai Gurah	Batu Taba	Biaro Gadang	Lambah	Panampuang	Pasia
	Interpretasi informasi baru				Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 3
SIA	Organisasi kemasyarakatan	Prioritas 2			Prioritas 3		Prioritas 3	
	Forum musyawarah kemasyarakatan	Prioritas 2		Prioritas 3	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 2
	Organisasi sektoral	Prioritas 2		Prioritas 3	Prioritas 1	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 2
	Forum diskusi usaha	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 1	Prioritas 3	Prioritas 2	
	Pertukaran informasi terbaru usaha	Prioritas 2		Prioritas 3	Prioritas 1	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 3
	Gotong royong dan kerja sama	Prioritas 3			Prioritas 2			Prioritas 3
	Solidaritas	Prioritas 3			Prioritas 3			Prioritas 3
	Kejujuran & kepercayaan antar masyarakat							Prioritas 3
PTA	Sarana pendukung kegiatan produksi industri lokal		Prioritas 3					
	Ketersediaan internet untuk umum						Prioritas 3	
ITA	Ruang utk tempat tinggal		Prioritas 3			Prioritas 3		
	Ruang utk berusaha				Prioritas 3	Prioritas 3		
	Kepemilikan alat transportasi		Prioritas 3		Prioritas 3	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 2
	Kepemilikan alat komunikasi							Prioritas 3
	Kepemilikan alat akses informasi		Prioritas 3		Prioritas 3	Prioritas 3		
	Pendapatan/pemenuhan kebutuhan (tingkat)		Prioritas 3		Prioritas 3	Prioritas 3		Prioritas 3
	Tabungan	Prioritas 1	Prioritas 3	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 1
EIA	Kredit/ pinjaman bank	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 3	Prioritas 3
	Mendapatkan pekerjaan	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 3
	Memulai usaha		Prioritas 3		Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 3
	Menyalurkan aspirasi/ ikut dlm pembangunan				Prioritas 3		Prioritas 3	
	Kemudahan mendapatkan bahan baku produksi		Prioritas 3		Prioritas 3			
	Bantuan/subsidi pemerintah dlm pembangunan	Prioritas 3	Prioritas 3		Prioritas 3		Prioritas 2	Prioritas 3
	Aplikasi kesehatan asuransi	Prioritas 3	Prioritas 3		Prioritas 3	Prioritas 3		Prioritas 3
	Pembiayaan pendidikan	Prioritas 3	Prioritas 3		Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 3
	Pembelian/ pembayaran sewa rumah	Prioritas 2	Prioritas 3		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
	Pembiayaan transportasi				Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 3	Prioritas 3

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Tabel 4 di atas menggambarkan bahwa masing-masing nagari memiliki fokus prioritas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan potensi yang dimiliki juga membawa kepada konsekuensi atas beragamnya bentuk rencana yang dibutuhkan oleh nagari untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi atau kelebihan yang dimiliki masing-masing nagari, yang bisa dimanfaatkan untuk merancang strategi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Identifikasi kualitas ketersediaan 5 (lima) kelompok aset menunjukkan kondisi yang baik untuk jenis aset berwujud publik, serta kondisi cukup menuju baik untuk keempat jenis aset lainnya. Dari sisi kebermanfaatannya, secara umum semua jenis aset juga dinilai memberikan manfaat. Analisis indeks kapabilitas masyarakat nagari di Kecamatan Ampek Angkek menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat berada dalam keadaan relatif baik dimana rerata ketersediaan aset menunjukkan nilai cukup, dan memberikan manfaat terhadap kegiatan penduduk sehari-hari. Identifikasi secara lebih lanjut menghasilkan pemetaan kebutuhan peningkatan kapabilitas pada beberapa komponen yang memiliki nilai persepsi ketersediaan masih relatif rendah. Hasil pemetaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual isu-isu pembangunan secara lintas aspek untuk masing-masing nagari. Ada beberapa rekomendasi di dalam penelitian ini.

1. Perlu partisipasi yang intensif dari penduduk lokal walaupun peluang untuk berpartisipasi dinilai pada indeks 1,07 atau tergolong baik.
2. Forum-forum yang berlandaskan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun ekonomi sebaiknya dapat lebih dihidupkan karena mampu menghidupkan kesadaran penduduk akan isu-isu lokal dan juga dapat meningkatkan kebermanfaatannya individu melalui jejaring koneksi. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya lokal nagari khususnya pada kemampuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi inovatif yang masih kurang mendukung.
3. Perlu kerja sama dengan pihak luar dalam membantu perancangan konsep pembangunan desa yang lebih komprehensif juga agar masyarakat lokal bisa secara bertahap menyerap kemampuan sehingga mampu melaksanakan pembangunannya secara lebih mandiri.

Ucapan Terima Kasih dan Penyandang Dana

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah membiayai penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada 101 orang responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner, dan juga kepada Balai Penyuluh Pertanian Kec. Ampek Angkek, perwakilan Wali Nagari, serta perwakilan petani dan pengusaha atas informasi dan data yang telah diberikan kepada penulis.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

Referensi

- BPP. (2019). *Profil Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ampek Angkek*.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). Innovation and Learning: The Two Faces of R & D. *The Economic Journal*, 99(397), 569. <https://doi.org/10.2307/2233763>
- Ghani, E. (2013). *How to Avoid Middle Income Traps?* World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-avoid-middle-income-traps>
- Gkartzios, M., & Lowe, P. (2019). Revisiting neo-endogenous rural development. In *The Routledge Companion to Rural Planning* (pp. 159–169). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315102375-17>
- Jamal, E. (2009). Membangun momentum baru pembangunan pedesaan di Indonesia. *Jurnal*

- Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 28(1), 7–14.
<https://doi.org/10.21082/jp3.v28n1.2009.p7>
- Korten, D. C. (1984). Strategic Organization for People-Centered Development. *Public Administration Review*, 44(4), 341. <https://doi.org/10.2307/976080>
- Lowe, P., Ray, C., Ward, N., Wood, D., & Woodward, R. (1998). *Participation in rural development: a review of European experience*.
- Pramono, R. (2020). *Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas*. Deepublish.
- Pramono, R., Nurfajrina, I. A., & Nariswari, N. (2019). Apek-Aspek Pembentuk Kualitas Tempat Berdasarkan Survei Kapabilitas: Determinan bagi Kebahagiaan Masyarakat. *TATALOKA*, 21(1), 153. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.153-169>
- Pramono, R. W. D. (2016). *Capability Approach for well-being Evaluation in Regional Development Planning: Case Study in Magelang Regency, Central Java, Indonesia*.
- Putterman, L. (2013). Institutions, social capability, and economic growth. *Economic Systems*, 37(3), 345–353. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2012.12.002>
- Robeyns, I. (2017). *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined* (1st editio). Open Book Publisher.
- Rustidja, E. S. (2007). Telaah kendala penerapan pengembangan ekonomi lokal: pragmatisme dalam praktek pendekatan PEL. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 18(2), 103–123.
- Sen, A. (2000). *Development as Freedom*. Anchor Books.